



PERKEMBANGAN PERS INDONESIA SEBAGAI IDENTITAS BANGSA PADA 1945-1998

Arum Asti Andani¹, Muhammad Iqbal Birsyada²
Universitas PGRI Yogyakarta^{1,2}
Email: iqbal@upy.ac.id

Abstract

The press is always based on the press it adheres to, but the press is always influenced by the political system of the country where the press is located. The political situation in Indonesia has also changed the media in Indonesia. This research attempts to answer and explain the development of the press in Indonesia in 1945-1998. This research method uses historical to the theme being discussed. The results of this research began in the Independence and New Order eras where the Indonesian press adhered to an authoritarian press typology model. Under this system, the press is nothing more than a government mouthpiece. The collapse of the reorganization brought good news to the Indonesian media, and many reforms occurred in the media sector. During the era of President Habib, Gusdur and Megawati's administration marked the beginning of the development of press freedom in Indonesia. On the other hand, ideal coverage was achieved during the SBY administration, where the government did not interfere with press activities. Second, the press at that time followed the principle of freedom, but however it was directed at general norms. The critical and constructive press environment in the era of President SBY's administration is expected to continue, going further into the era of President Jokowi who has just completed his duties as head of state, and of course will bring a new historical pattern to the development of the press in that era.

Keywords: *Mass Media, Press, National Identity, Independence, New Orde, Reform*

Abstrak

Pers selalu didasarkan pada pers yang dianutnya, namun pers selalu dipengaruhi oleh sistem politik negara dimana pers tersebut berada. Situasi politik di Indonesia juga telah mengubah media di Indonesia. Penelitian ini berupaya menjawab dan menjelaskan perkembangan pers di Indonesia pada tahun 1945-1998. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah sesuai dengan tema yang dibahas. Hasil penelitian ini bermula pada masa Kemerdekaan dan Orde Baru dimana pers Indonesia menganut model tipologi pers yang otoriter. Dalam sistem ini, pers tidak lebih dari sekedar corong pemerintah. Runtuhnya reorganisasi membawa kabar baik bagi media Indonesia, dan banyak reformasi terjadi di sektor media. Pada era pemerintahan Presiden Habib, Gusdur dan Megawati menandai dimulainya perkembangan kebebasan pers di Indonesia. Sebaliknya, pemberitaan yang ideal dicapai pada masa pemerintahan SBY, dimana pemerintah tidak mencampuri aktivitas pers. Kedua, pers pada masa itu menganut asas kebebasan, namun tetap diarahkan pada norma-norma umum. Lingkungan pers yang kritis dan konstruktif pada era pemerintahan Presiden SBY diperkirakan akan terus berlanjut, semakin memasuki era Presiden Jokowi yang baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai



kepala negara, dan tentunya akan membawa pola sejarah baru dalam perkembangan perekonomian. pers pada masa itu.

Kata kunci: Media Massa, Pers, Identitas Nasional, Kemerdekaan, Orde Baru, Reformasi

PENDAHULUAN

Secara teoritik pengertian yang lebih luas dari pers meliputi seluruh publikasi seperti: Pers elektronik, radio, TV. Di sisi lain, cakupan yang lebih erat dalam artian pers terdapat pada mesin seperti surat kabar, majalah, dan kantor pemberitaan. Di zaman modern ini, media memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Secara etimologis, kata pers diambil dari bahasa Inggris. Dengan kata lain pers berarti tekanan, tekan, mesin cetak. Dalam hal ini yang dimaksud dengan mesin cetak adalah mesin cetak untuk menciptakan karya tulis yang dicetak di atas kertas (Mahpudin, 2019).

Pers merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya guna memelihara kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik. Dalam konteks Pendidikan, peran pers dalam Masyarakat dapat menjadi agen perubahan sosial sekaligus sebagai penyampai gagasan untuk memecahkan problem-problem sosial kemasyarakatan (M. Iqbal Birsyada, 2014). Olehkarena itu melalui media, keinginan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mudah terpenuhi. Melalui pers, media umum mampu memobilisasi dengan lebih baik dibentuk dan badan-badan kontrol untuk berbagai lapisan masyarakat dibentuk (Antoni et al., 2017).

Pers merupakan subsistem sosial yang letaknya berdampingan dengan subsistem lainnya. Oleh karena itu, media tidak dapat dipisahkan dari pengaruh sistem sosial. Pers umumnya diatur oleh pers umum di mana sistem itu berada, tetapi pers itu sendiri diatur oleh sistem politik yang ada. Singkatnya, perkembangan dan pertumbuhan



media berita tidak terlepas dari perkembangan dan pertumbuhan sistem politik yang merupakan subsistem dari sistem politik yang ada di mana media berita itu berada (Hutagalung, 2013).

Pers tidak hanya memenuhi hak atas informasi, tetapi juga sebagai alat untuk warga negara dalam mengungkapkan pemikiran serta pendapatnya, yang memainkan peran utama didalam negara demokrasi. Peliputan yang bebas serta bertanggung jawab merupakan elemen dari negara dan pemerintahan yang demokratis. Setelah administrasi, legislasi dan keadilan, media adalah pilar keempat demokrasi. Pers berperan dalam mengontrol ketiga pilar tersebut, berjalan berdasarkan checks and balances. Untuk memainkan perannya, kita perlu melindungi kebebasan pers agar dapat menyampaikannya secara jujur dan adil. Selain itu, media perlu kebebasan dari kapitalisme dan sistem politik untuk mendukung pilar keempat demokrasi. Kepentingan pers tidak hanya mendukung pemilik modal, tetapi juga mengabadikan kekuatan sistem politik tanpa mempertimbangkan kepentingan penduduk yang lebih besar (Manan, 2016)

Pers memiliki pengaruh yang besar terhadap sejarah pergerakan nasional Indonesia. Media dapat membangun sejarah dan serta menyampaikan pemikiran dan pemikiran seseorang atau sekelompok orang lain, dalam jumlah tertentu meskipun dalam cakupan yang tidak ditentukan (Kosasih, 2013). Selain itu pada era kolonial Belanda, pers di Indonesia menjadi penyambung ide-ide Masyarakat dalam rangka perjuangan menuju kemerdekaan (Mahmud Chaniago & Rusmiani Humairah, 2019). Walaupun demikian fungsi pers pada masa kolonial Belanda selain sebagai penyampai kabar berita dan misi Belanda juga menjadi penyebar agama kristen (Chaniago & Umairah, 2018).



Oleh karena itu, pada masa Pergerakan Nasional Indonesia, media tidak bebas dari keadaan sistem politik yang menaruh media pada subsistem kolonial. Subsistem kolonial dimaksudkan untuk menjelaskan realitas kehidupan orang yang berbeda aspek kehidupan. Oleh karena itu, pers telah membuka hati masyarakat di sini sekaligus menjadi alat promosi dalam pergerakan saat ini (Rahzen, 2007). Selain itu perkembangan pers di daerah di rawan konflik juga menjadi semakin menguat karena masing-masing membawa semangat etnisitas (Ayu Astuti, Pujiati, 2023). Pers dalam kurun waktu era Orde Baru sampai Reformasi berada dalam konteks kebebasan dan komersialisasi sehingga menciptakan pluralisme media. Sejak tahun 1980-an peranan pers menjadi lemah dalam upaya sebagai alat kontrol jalannya pemerintahan bahkan didominasi oleh segelintir pemilik modal (Hutagalung, 2013).

Penelitian ini berusaha menggali dan menjelaskan bagaimana perkembangan pers sebagai identitas bangsa selama kurun waktu 1945-1998. Dipilihnya kurun waktu ini karena pers pada era Kemerdekaan hingga Reformasi mengalami banyak kemunduran khususnya dalam penyampaian kebebasan dan kontrol kekuasaan. Kemunduran peranan pers tersebut dapat dilihat dalam kurun waktu kemedekaan hingga era Orede Baru di mana pers lebih mencerminkan sebagai alat penyampai kabar berita pemerintah. Namun demikian pada era reformasi peranan pers mulai terlihat kebebasannya di mana pemerintah memberi kebebasan kepada pers untuk menyampaikan aspirasi rakyat secara independent. Sebagian besar penelitian sebelumnya berkuatat pada peranan pers pada masa kolonial Belanda namun masih jarang atau sedikit yang berfokus pada mengkombinasikan peranan pers era Kemerdekaan sampai Reformasi.



Peran Pers pada kurun waktu tersebut belum banyak menjadi kajian peneliti maupun penulis Sejarah secara spesifik khususnya peranan sebagai identitas bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Sejarah dilakukan melalui 5 tahapan, yakni: 1) pemilihan topik; 2) heuristik; 3) verifikasi; 4) interpretasi; dan 5) historiografi. Pada tahap pertama, topik yang dipilih dan dibahas merupakan topik yang memiliki kaitan dengan sejarah serta memiliki kedekatan emosional dan intelektual dan yang terpenting adalah subjektif dan objektif (Sugeng Priyadi, 2012). Dalam penelitian ini, peneliti mengambil topik "Perkembangan Pers Indonesia Sebagai Identitas bangsa."

Tahap kedua, heuristik atau pengumpulan sumber. Dalam penelitian ini digunakan sumber sekunder seperti referensi buku, artikel jurnal, dan segala sumber yang akurat dan relevan serta tentunya berkaitan dengan topik penelitian ini. Dalam tahap ini, peneliti menganalisis sumber-sumber berupa artikel-artikel jurnal yang bereputasi dan juga buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian.

Ketiga, verifikasi atau kritik sumber, yang terdapat dua jenis, yakni: kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern dilakukan dengan mengecek keaslian sumber sejarah khususnya pada bagian fisik sumber, sementara kritik intern dilakukan dengan mengecek keaslian sumber sejarah terutama pada isi sumber sejarah tersebut.

Keempat, interpretasi atau disebut juga penafsiran. Penafsiran terdiri dari 2 jenis, yakni analisis dan sintesis. Analisis dapat diartikan sebagai sumber-sumber sejarah, sementara sintesis merupakan menyatukannya agar terbentuk sebuah tulisan dengan makna yang utuh (Kuntowijoyo, 1995). Penafsiran disini dilakukan dengan cara



menguraikan sumber-sumber yang terdiri dari beberapa buku, kemudian juga dari berbagai jurnal-jurnal ilmiah, lalu menghubungkan satu dengan yang lainnya kemudian menyatukannya agar terbentuk sebuah tulisan dengan makna yang utuh.

Penulis menganalisis melalui referensi-referensi yang telah dikumpulkan terkait "Perkembangan Pers Indonesia Sebagai Identitas bangsa", kemudian sintesis dilakukan untuk menyatukan berbagai pemahaman dari sumber yang terkait dengan topik penelitian.

Kelima historiografi yang biasa disebut penulisan sejarah. Didalam penulisan sejarah ada satu aspek yang sangat penting, yaitu aspek kronologi (Kuntowijoyo, 1995). Penelitian ini berusaha untuk memenuhi aspek tersebut dengan cara melakukan penulisan berdasarkan urutan terjadinya peristiwa. Secara spesifik kajian dalam artikel ini berfokus pada perkembangan pers sebagai identitas bangsa pada kurun waktu 1945-1998.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pers

Kata pers berasal dari bahasa latin yaitu *pressus*. Ini berarti tekanan, tekan, kompresi, kencang. Pers Indonesia berasal dari bahasa Belanda dan memiliki arti yang sama dengan bahasa Inggris "printing press" sebutan untuk pers. Adanya proses penerjemahan secara umum merupakan media penindasan atau penekanan dalam masyarakat. Maknanya yang lebih jelas terletak pada fungsinya sebagai kontrol sosial. Pengertian media berita secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua pengertian. Artinya, media massa atau elektronik yang rutin memberitakan untuk masyarakat umum berupa kenyataan, pendapat, saran, ataupun catatan. Pemberitaan dalam pengertian



sempit adalah media cetak seperti Koran, majalah mingguan, majalah, dan media elektronik meliputi radio, film, dan televisi.

Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, pers adalah lembaga sosial, sarana media untuk melakukan kegiatan jurnalistik, meliputi pengambilan, perolehan, kepemilikan, penyimpanan, pengolahan, dan penyampaian informasi secara tertulis. Audio, catatan, data informasi, grafik, atau format lain dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan semua saluran yang tersedia. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, WordPress diartikan untuk perusahaan percetakan dan penerbitan bagi warga negara yang mengirimkan informasi kepada wartawan dan menyiarkan berita di Koran, majalah, televisi, radio dan lainnya.

Pada umumnya, pers adalah segenap industri media yang ada, yang cetak ataupun elektronik. Menurut spesifik, konsep pers merupakan media cetak (*printing medium*). Oleh karena itu, undang-undang pers secara umum berlaku untuk semua industri media, khususnya media cetak. Prinsip-prinsip pengelolaan pers Indonesia menurut undang-undang sebagai berikut: Kebebasan pers adalah bentuk kedaulatan masyarakat yang berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Surat kabar nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Pers juga berfungsi sebagai institusi ekonomi. Kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pers nasional tidak dikenakan sensor, dan larangan. Sebagai jaminan kebebasan pers, pers nasional berhak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan ide dan berita (Akil, 2014).

Asas, Fungsi dan Peranan Pers

1) Asas Pers



Asas Demokrasi, pers harus mendukung Asas Demokrasi: mendukung nilai-nilai demokrasi, menghormati dan mengamankan keberadaan hak asasi manusia, serta mengungkapkan ide ataupun pendapat baik secara lisan maupun tertulis. Asas keadilan harus mendukung nilai keadilan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Asas-asas Hukum Tertinggi harus senantiasa berlandaskan hukum dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Maka harus dilakukan dengan hukum sebagai dasar tindakan di tingkat teratas. Kebebasan pers dijamin oleh undang-undang, tetapi kebebasan pers tidak selalu bebas bertindak

2) Fungsi Pers

Fungsi 1) Informatif: mendapatkan pemberitaan untuk masyarakat dengan versi yang tertata. 2) Fungsi Kontrol: bertanggung jawab pada fungsi ini, terus di ibaratkan masuk ke balik panggung kejadian untuk menelusuri pekerjaan pemerintah. 3) Fungsi Interpretatif atau Direktif: memberikan interpretasi dan bimbingan terus harus menceritakan kepada masyarakat perihal arti suatu kejadian. 4) Fungsi Menghibur: para wartawan menceritakan kisah dunia hidup dan menarik. 5) Fungsi Regeneratif: membantu menyampaikan warisan sosial untuk generasi baru agar terjadi proses regenerasi dari angkatan tua sampai angkatan yang lebih muda. 6) Fungsi Pengawasan: hak warga negara harus berkerja harus menjamin hak setiap pribadi untuk didengar dan diberi penerangan untuk hal yang dibutuhkan. 7) Fungsi Ekonomi: melayani sistem ekonomi melalui iklan. 8) Fungsi Swadaya: pers mempunyai kewajiban untuk memupuk energi permodalan sendiri untuk memelihara ketentuan yang asli.

3) Peranan Pers

Peranan pers mencakup hak warga negara untuk mengetahui, mendirikan anggaran dasar demokrasi, mewujudkan Supremasi hukum, hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Peran pers dalam menyebarkan kesadaran kebangsaan Indonesia tidak hanya untuk menyebarkan wacana kemajuan, tetapi juga untuk menyebarkan bahasa Melayu. Era kedua sejarah pers Indonesia dimulai pada tahun 1854. Putaran tersebut mulai munculnya undang-undang pers disahkan bagi pemerintah kolonial. Pada saat ini, relaksasi kegiatan pers mulai diterapkan. Pada saat inilah penduduk asli Amerika mulai berperan di dunia media. Banyak pers, meski masih milik orang Eropa, mulai melibatkan masyarakat adat dalam proses produksinya (Habib F, 2017).

Perkembangan Pers Era Kemerdekaan

Indonesia tidak hanya sebagai negara hukum melainkan juga merupakan negara dengan sistem pemerintahan demokratis, tidak memihak sosial dan manusiawi. Media sebagai ekspresi kebebasan fakta penduduk untuk menempati posisi sah didalam sistem sosial. Perkembangan media di Indonesia pada umumnya tidak terlepas dari lingkungan politik Indonesia. Perkembangan pers di Indonesia dapat dilanjutkan dari masa perjuangan sampai dengan era reformasi sekarang. (Ii & Pers, n.d.). Dari sebelum Indonesia diproklamasikan, pers Indonesia sudah mulai berkembang. Di masa penjajahan Belanda pertengahan abad 18, penerbitnya sendiri adalah penduduk Belanda,



tetapi penduduk Belanda mulai mengenalkan pers ke Indonesia. Pada masa itu pers Indonesia tidak sama dengan pers Belanda yang pada masa itu menggunakan pers kolonial sebagai sarana bagi Belanda untuk mempertahankan kekuasaan.

Sementara itu, pelopor prosa nasional sebagai media informasi dan komunikasi telah menjadi bagian integral dari gerakan nasional. Pers kemudian semakin berkembang di berbagai wilayah Indonesia sebagai alat aspirasi perjuangan rakyat dan bukan sekedar penyampai kabar berita dari pemerintah Hindia Belanda pada awal Abad ke-20. (Mahmud Chaniago & Rusmiani Humairah, 2019). Selain itu pers pada masa kolonial Belanda juga membawa misi penyebaran agama kristen (Chaniago & Umairah, 2018). Singkatnya pers menjadi agen sosial yang ampuh dalam membentuk opini perjuangan rakyat Indonesia pada waktu itu untuk memperjuangkan kemerdekaan.

Secara historis, pendiri negara menggunakan pers untuk sarana memperjuangkan kemerdekaan. Memang, perkembangan media kolonial pada pertengahan abad ke 19, Para intelektual mendorong Indonesia menyerap kebudayaan pers ataupun menggunakan media cetak sebagai alat untuk mendirikan kesadaran publik. Menurut teorinya, di dalam tahapan sebuah proses pembaharuan akan muncul tokoh-tokoh yang mempunyai mentalitas yang tangguh dan sanggup menghadapi setiap proses modernisasi (Muhammad Iqbal Birsyada & Permana, 2019). Sejak lahirnya Budi Utomo Mei 1908, media telah menjadi alat komunikasi penting agar meningkatkan kepekaan masyarakat dan juga mempromosikan kemerdekaan negara.

Pada era kemerdekaan pers juga memiliki peran membangkitkan identitas etnisitas masyarakat di daerah (Ayu Astuti, Pujiati, 2023).



Singkatnya dalam konteks ini pers menjadi wadah aspirasi perjuangan masyarakat di daerah untuk mewujudkan kemerdekaan.

Hal ini berlanjut hingga Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Mempresentasikan sebuah revolusi dalam bermacam aspek keadaan penduduk Indonesia. Tentu saja memerlukan revolusi pada sistem pers seperti bakal terus mendapatkan kelonggaran dari lama ditahan dan ditentukan pemerintahan Belanda. Hingga negara Indonesia merdeka, berikut ini ditekankan sebagai ciri umum pers pada masa itu, yaitu:

- a. Sejak awal era kolonial Hindia Belanda, peran pemerintah kolonial di bidang pers tampak sangat dominan.
- b. Pers digunakan untuk sarana kepentingan penguasa dengan tidak mendapatkan kebebasan bergerak dikarenakan ketentuan dan kekuatan manajemen.
- c. Akhirnya, cuma publikasi yang sesuai dengan pemerintah dapat diizinkan untuk bertahan, karena tingkat intelektual masyarakat memiliki efek mendalam pada kehidupan dan perkembangan penerbitan.
- d. Sehingga pada saat itu konflik kepentingan yang muncul antara pentingnya kekuasaan sebagaimana pers belum terjadi sebagai konflik yang disebabkan oleh penggambaran pers yang merugikan masyarakat.

Perkembangan Pers Era Orde Baru Sampai Reformasi

Perkembangan pers pada era Orde Baru pada dasarnya dimulai tahun 1964 ketika tentara Pancasila, termasuk media, secara terbuka melawan kelompok PKI. Media tidak bertanggung jawab atas rakyat, tetapi terhadap kekuasaan Orde Baru. Karena kurangnya ketentuan berbicara, pers Indonesia dibawah sistem orde baru tidak dapat



memantapkan dirinya sebagai pilar keempat demokrasi. Laju kebebasan mereka dikendalikan dengan ketat, karena pemerintah orde baru percaya bahwa kebebasan pers tentu mengganggu stabilitas nasional, keamanan, dan kepentingan umum. Maka, sepanjang sejarah Orde Baru, perlakuan opresif negara terhadap media dimulai.

Perkembangan media berita Indonesia pada awal Orde Baru dilatarbelakangi oleh kondisi kerangka sosial, ekonomi dan politik yang dipengaruhi oleh dinamika perubahan yang terus menerus. Dinamika kehidupan masyarakat juga mempengaruhi klasifikasi manusia yang berbeda-beda. Organisasi berita Indonesia dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan klasifikasi, termasuk klasifikasi media, media berita kolonial, media berita Cina, dan media berita nasional. Jacob Oetama adalah tokoh nasional berperan penting untuk perkembangan media di Indonesia. Jacob Oetama, salah satu pers nasional Indonesia, yang menghimbau kepada masyarakat Indonesia harus mendukung dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Kegiatan nyata dalam berbagai tulisannya di surat kabar. Ide-ide nasionalisme yang ditulis Jacob Oetama di koran kompas dari tahun 1970-2001 mencakup Bhinneka Tunggal Ika, ideologi Pancasila, kombinasi juga pembubaran rakyat, masalah agama dan pengetahuan nusantara, dan humanisme transcendental (Nusaibah et al., 2021).

Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 lahirnya sistem politik Indonesia, filosofis pers biasanya adalah ketentuan pers yang profesional (ketentuan pers dipertanggungjawabkan atas penduduk atau keperluan masyarakat, yang telah dicantumkan didalam pembukaannya). Filosofis seperti itu digantikan oleh filosofi sebelum itu, seperti pelaporan bebas dan bertanggung jawab. Walaupun demikian perkembangan pers pada era Orde Baru sampai reformasi banyak

mengalami tantangan khususnya dalam mengawal dan mengontrol kebijakan pemerintah. Disisi lain pers telah didominasi oleh segelintir pemilik modal sehingga menjadi bagian dari penetrasi dari kepentingan dan kapitalisme global (Hutagalung, 2013).

Pada era reformasi pers mengalami banyak perubahan yang membawa kabar baik bagi media-media di Indonesia. Hal ini karena pemerintah tidak terlalu ikut campur dalam perkembangan atau konten isi berita di media masa. Artinya pada era kepemimpinan presiden BJ. Habibie sampai presiden Jokowi pers telah diberi hak dan kebebasan dalam menawal demokrasi di Indonesia. Namun demikian pers diarahkan untuk mengawal norma-norma umum Masyarakat. Dengan demikian pers dalam era reformasi telah terbentuk lingkungan yang kritis dan konstruktif.

KESIMPULAN

Peranan pers sebagai identitas bangsa mengalami proses yang panjang sejak tahun 1945 sampai era Reformasi. Pada era kemerdekaan peranan pers digunakan sebagai penyampai aspirasi Masyarakat dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Pers pada masa ini tidak sekedar menjadi penyampai kepentingan pemerintah kolonial Belanda namun juga menjadi penyebar agama Kristen. Pada tataran di wilayah daerah, pers digunakan oleh Masyarakat sebagai alat perjuangan sekaligus sebagai penguat identitas etnisitas masyarakat di daerah. Pada masa Orde Baru pers lebih banyak mengalami penurunan sebagai daya kritis, penyampai aspirasi Masyarakat dalam mengawal perjalanan kekuasaan pemerintahan. Disisi lain pers pada masa reformasi telah mengalami proses pluralisme. Pers telah menjadi bagian dari penetrasi kepentingan global yang lebih bercorak kapitalis. Namun demikian pers pada era reformasi mengalami perkembangan yang



signifikan khususnya dalam mengawal kebebasan berpendapat. Disisi lain pemerintah juga tidak turut campur di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akil, M. A. (2014). REGULASI MEDIA DI INDONESIA (Tinjauan UU Pers dan UU Penyiaran). *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(2), 137–145.
- Antoni, Alfira, N., & Handayani, S. (2017). Studi Pendekatan Sejarah Komunikasi: Beberapa Catatan Pengalaman Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi*, 01(01), 657–667.
- Ayu Astuti, Pujiati, dan W. (2023). IDENTITY CONFLICT GAVE BIRTH TO NEWSPAPER : THE HISTORY. *PURBAWIDYA: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi*, 12(148), 216–230.
- Birsyada, M. Iqbal. (2014). Pengembangan Model Pembelajaran IPS Dengan Pendekatan Konstruktivisme Di Sekolah. *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, 41(2), 257–273.
- Birsyada, Muhammad Iqbal, & Permana, S. A. (2019). Nilai-nilai budaya keluarga pengrajin perak di Kota Gede Yogyakarta. *Reorientasi Profesionalisme Pendidik Dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0*, 406–418.
- Chaniago, D. M., & Umairah, U. R. (2018). Sejarah Pers Kolonial Di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 3798. <https://doi.org/10.15548/khazanah.v0i0.72>
- Habib F, M. (2017). Pers dan Bangkitnya Kesadaran Nasional Indonesia pada Awal Abad XX. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 13(1). <https://doi.org/10.21831/istoria.v13i1.17613>
- Hutagalung, I. (2013). Dinamika Sistem Pers di Indonesia. *INTERAKSI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 53–60.



- Ii, B. A. B., & Pers, A. S. (n.d.). *Samsul Wahidin, Hukum Pers, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 88. Ibid ., hal. 89. 1817.*
- Kosasih, A. (2013). Pers Tionghoa dan Dinamika Pergerakan Nasional di Indonesia, 1900 – 1942. *Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, 1(1), 1–20.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Benteng Budaya.
- Mahmud Chaniago, D., & Rusmiani Humairah, U. (2019). Pers Dan Perubahan Sosial Di Sumatera Barat Awal Abad Ke-Xx. *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 14–30.
<https://doi.org/10.15548/khazanah.v0i0.186>
- Mahpudin. (2019). Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia Ditinjau dari Segi Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 5(3), 53–65.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3382834>
- Manan, B. (2016). Pers Indonesia dan Hari Kemerdekaan Pers Sedunia. *Jurnal Dewan Pers*, 13(12), 13–16.
- Nusaibah, A. A., Abrar, A., & Martini, S. (2021). Sejarah Pemikiran Kebangsaan Jakob Oetama Pada Surat Kabar Kompas 1970-2001. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 5(1), 89–102.
<https://doi.org/10.29408/fhs.v5i1.3597>
- Sugeng Priyadi. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*. Ombak.